

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang menggambarkan konsep dasar variabel-variabel yang diteliti serta penelitian terdahulu yang dijadikan acuan serta perbandingan penulis dalam melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan pembahasan kerangka pemikiran teoritis yang berisikan model dan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat yang selanjutnya di ikuti dengan hipotesis penelitian.

2.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Ratna Sari, Setyadi dan Farouk (2015:107) penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam satu unit usaha tertentu. Dengan kata lain, penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam satu unit usaha. Penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan secara luas yakni menyerap tenaga kerja dalam arti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha. Apabila lapangan usaha yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam kondisi yang siap pakai, maka diperlukan peranan pemerintah untuk mengatasi masalah kualitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK, serta pelatihan keterampilan dan wawasan yang sehingga mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan (Mulyadi, dalam Alhiriani, 2013:9).

Untuk memperluas penyerapan tenaga kerja salah satu caranya adalah dengan terciptanya banyak lapangan pekerjaan baru. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja di antaranya, yaitu:

1. Padat Karya (*Labor Intensive*)

Padat karya atau *labor intensive* yaitu kegiatan proses produksi yang relatif lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan tenaga mesin, tujuannya yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga perusahaan yang menerapkan sistem ini dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

2. Padat Modal (*Capital Intensive*)

Padat modal atau *capital intensive* merupakan industri yang dibangun dengan modal yang besar dan didukung oleh teknologi tinggi, sehingga proses produksinya cenderung menekankan pada penggunaan mesin-mesin canggih dibandingkan dengan tenaga manusia. Banyak perusahaan lebih memilih teknologi padat modal ini dikarenakan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk tenaga kerja.

2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau *manpower* adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja (Simanjuntak, 2001:2). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa tenaga

kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Sabihi, Kumenaung & Niode, 2021:28).

Menurut Maryanti, Wiyati dan Thamrin (2017:33-34) secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun - 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur (Simanjuntak, 2001:2).

2.1.1.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Menurut Maryati, dkk. (2017, 39-41) tenaga kerja atau yang disebut penduduk usia kerja dapat diklasifikasikan atau di kelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penduduk

- a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang tenaga kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

- b. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun.

2. Berdasarkan Batas Kerja

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun sedang aktif mencari pekerjaan.

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat dan para pengangguran sukarela. Kelompok ini termasuk potensial *labor force* atau angkatan kerja sekunder, hal ini karena sewaktu-waktu dapat bekerja menjadi angkatan kerja.

3. Berdasarkan Kualitas

a. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau

pendidikan formal dan informal. Contohnya: pengacara, dokter, guru dan lain-lain.

b. Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga Kerja terlatih adalah tenaga kerjanya memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga dan sebagainya.

2.1.1.3 Teori-Teori Ketenagakerjaan

Menurut Mulyadi (2018:70-71) ada dua teori penting yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan, di antaranya yaitu:

1. Teori Lewis (1959)

Lewis mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lainnya. Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor

pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran.

Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dengan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimpangan tingkat pendapatan antar perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.

2. Teori Fei-Ranis (1961)

Teori ini berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri seperti kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak

pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh, di antaranya yaitu:

- a. Tahap di mana para penganggur semu (yang tidak menambah *output* pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.
- b. Tahap di mana pekerja pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri.
- c. Tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan penambahan *output* dan perluasan usahanya.

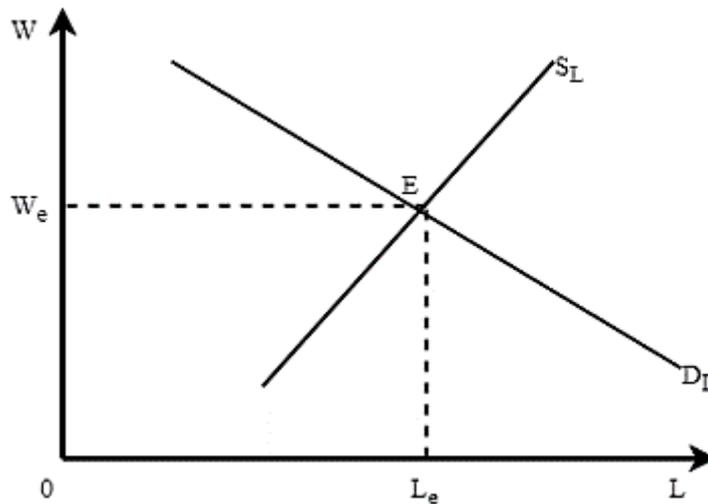
2.1.1.4 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat upah dapat menyebabkan semakin kecil permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja.

Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu

tertentu. Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan mempengaruhi tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Akibatnya kenaikan dari upah akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (Sumarsono, 2003:107).

Permintaan dan penawaran tenaga kerja sangat erat kaitannya dalam menentukan upah di suatu perusahaan (Sadono, 2003:369). Dalam suatu pekerjaan terdapat penawaran tenaga kerja yang besar tetapi tidak banyak permintaan, maka upah untuk mencapai tingkat yang tinggi sangat rendah. Sebaliknya jika dalam suatu pekerjaan yang terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas akan membuat permintaannya menjadi sangat besar, maka upah cenderung mencapai tingkat tinggi. Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan yang ada di masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor penyediaan dan permintaan tersebut. Besar penyediaan dan permintaan terhadap tenaga kerja dipengaruhi dengan tingkat upah. Jika tingkat upah turun maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat. Tetapi jika tingkat upah meningkat maka jumlah permintaan tenaga kerja menjadi menurun (Simanjuntak, 2001).



Gambar 2.1 Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja

Sumber: Mankiw (2012:379). Pengantar Ekonomi Mikro.

Keterangan:

S_L : penawaran tenaga kerja (*supply labor*)

D_L : permintaan tenaga kerja (*demand labor*)

W : upah

L : jumlah tenaga kerja

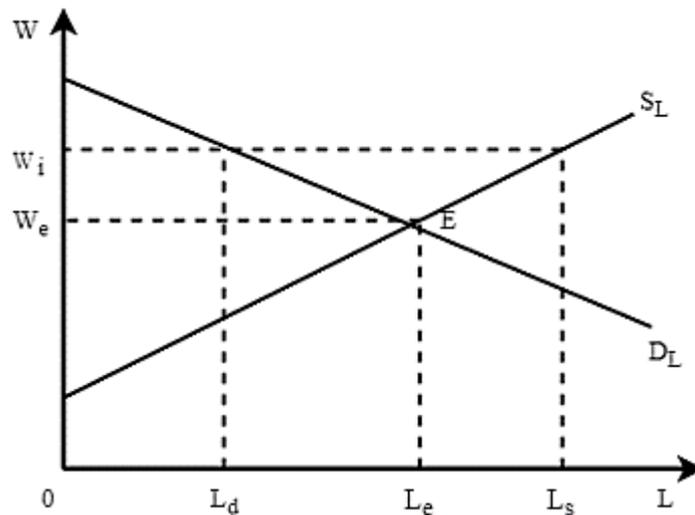
W_e : upah keseimbangan

L_e : jumlah tenaga kerja keseimbangan

E : keseimbangan permintaan dan penawaran

Kurva keseimbangan tenaga kerja pada gambar 2.1 menunjukkan pasar tenaga kerja sama dengan pasar lainnya di mana tunduk pada kekuatan permintaan dan penawaran. Para pekerja yang menentukan penawaran tenaga kerja, dan sebaliknya perusahaan yang menentukan jumlah permintaannya. Jika pemerintah tidak campur tangan, maka upah biasanya akan menyesuaikan hingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (Mankiw, 2004).

Penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah apabila tingkat upah meningkat, sebaliknya permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang apabila tingkat upah meningkat.



Gambar 2.2 Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Sumber: Chusna (2013:16). Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011.

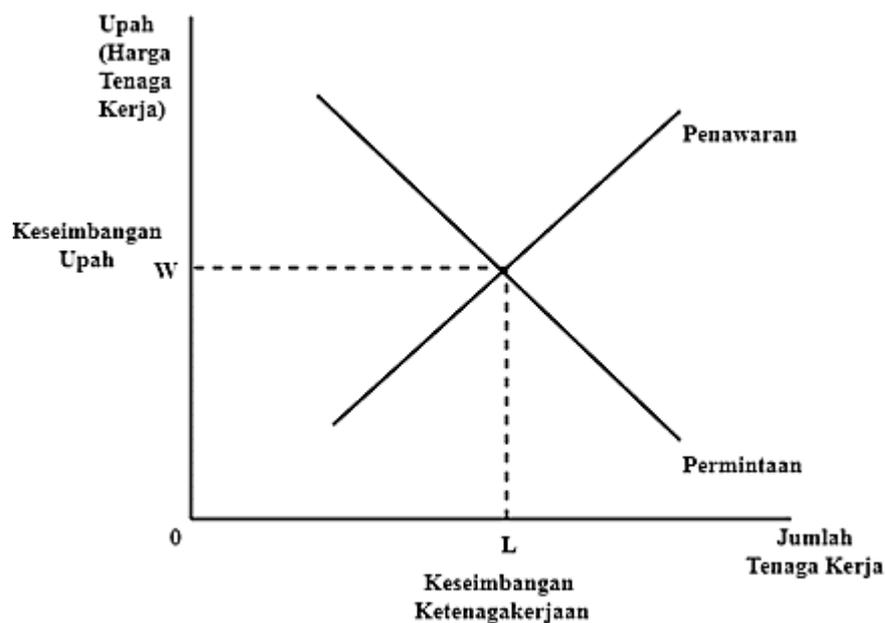
Dengan asumsi bahwa semua pihak mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar tenaga kerja, maka teori Neo-Klasik beranggapan bahwa jumlah penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan. Keadaan pada saat penawaran tenaga kerja selalu sama dengan permintaan dinamakan titik ekuilibrium (titik E). Dalam hal penawaran dan permintaan, tidak terjadi pengangguran (Chusna, 2013:16).

Kenyataan titik ekuilibrium itu tidak pernah tercapai karena informasi tidak pernah sempurna dan hambatan-hambatan institusional selalu ada. Upah yang berlaku (W) pada umumnya lebih besar dari pada upah *equilibrium* (W_e). Pada tingkat upah W_i , jumlah penawaran tenaga kerja adalah L_s sedang permintaan hanya

sebesar L_d . Selisih antara L_s dan L_d merupakan jumlah penganggur (Chusna, 2013:16-17).

2.1.1.5 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, upah ditentukan dengan dua fakta, yaitu upah menyesuaikan keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja dan upah setara dengan nilai penawaran dan permintaan tenaga kerja.



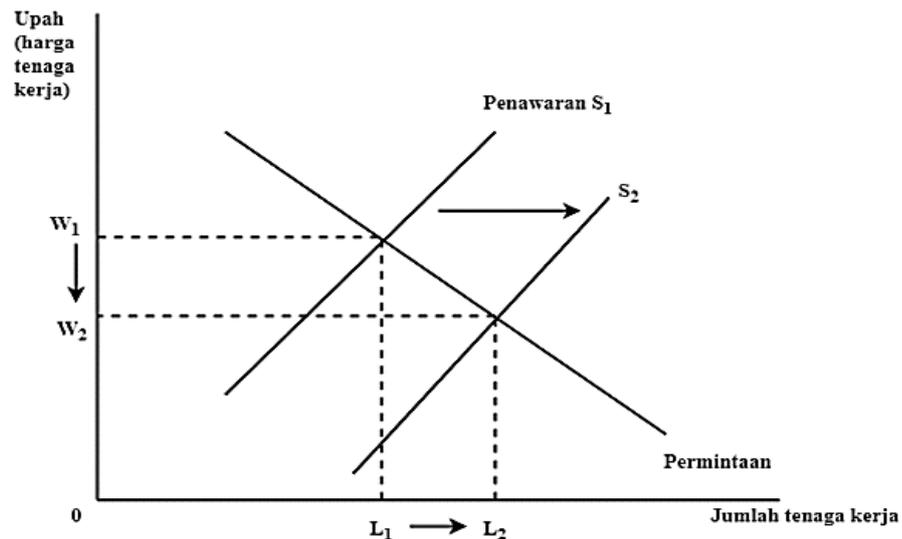
Gambar 2.3 Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Sumber: Mankiw, 2014:380. Pengantar Ekonomi Makro.

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja dalam keadaan seimbang. Keadaan upah dan jumlah tenaga kerja telah menyesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Ketika pasar berada di titik keseimbangan, maka setiap perusahaan akan membeli tenaga kerja sebanyak mungkin selama masih memberi keuntungan pada keseimbangan upah. Setiap perusahaan mengikuti aturan untuk memaksimalkan laba, dengan mempekerjakan pekerja sampai nilai produk marjinal tenaga kerja sama dengan upah. Oleh karena itu, nilai upah harus seimbang dengan

nilai marjinal produk tenaga kerja saat perusahaan menyeimbangkan penawaran dan permintaan (Mankiw, 2014:379-380).

1. Pergeseran dalam Penawaran Tenaga Kerja



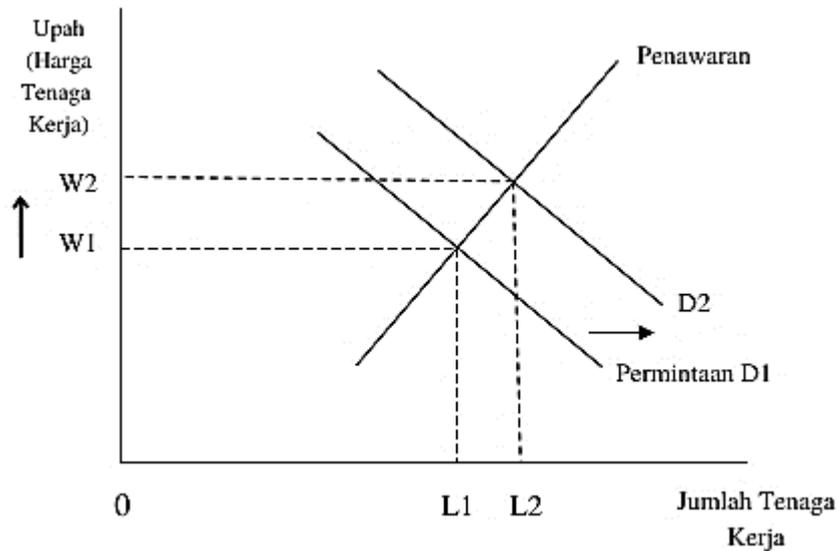
Gambar 2.4 Kurva Pergeseran Penawaran Tenaga Kerja

Sumber: Mankiw, 2014:381. Pengantar Ekonomi Makro.

Gambar 2.4 menunjukkan penawaran tenaga kerja meningkat dan bergeser ke arah kanan dari S₁ ke S₂ pada tingkat upah W₁, jumlah penawaran tenaga kerja telah melampaui dari jumlah permintaan. Kelebihan jumlah tenaga kerja membuat upah pekerja menurun. Menurunnya upah W₁ ke W₂ membuat perusahaan memperoleh keuntungan untuk menyewa pekerja lebih banyak sehingga tenaga kerja meningkat dari L₁ ke L₂.

Pada saat jumlah pekerja yang telah disewa meningkat maka produk marginal pekerja akan turun. Dalam keseimbangan yang baru, baik upah ataupun nilai produk marginal tenaga kerja lebih rendah dari sebelum gelombang pekerja baru datang (Mankiw, 2014:380-381).

2. Pergeseran dalam Permintaan Tenaga Kerja



Gambar 2.5 Kurva Pergeseran Permintaan Tenaga Kerja

Sumber: Mankiw, 2014:382. *Pengantar Ekonomi Makro*.

Pada gambar 2.5 permintaan tenaga kerja naik dari D_1 ke D_2 , keseimbangan upah dari W_1 ke W_2 , dan keseimbangan ketenagakerjaan naik dari L_1 ke L_2 . Perubahan dalam upah menunjukkan perubahan dalam nilai produk marginal tenaga kerja dengan harga produk perusahaan yang tinggi, produk tambahan dari pekerja ekstra lebih bernilai (Mankiw, 2014:381).

2.1.1.6 Elastisitas Permintaan akan Tenaga Kerja

Simanjuntak (2001:91-92) mengemukakan bahwa elastisitas permintaan akan tenaga kerja didefinisikan sebagai persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Secara umum dituliskan dalam persamaan:

$$e = \frac{\Delta N/N}{\Delta W/W} \dots\dots\dots(2.1)$$

di mana e adalah elastisitas permintaan akan tenaga kerja, ΔN adalah perubahan jumlah pekerja yang terjadi, N adalah jumlah yang bekerja mula-mula, ΔW adalah besarnya perubahan tingkat upah, dan W adalah tingkat upah yang sedang berlaku. Rumus (2.1) dapat ditulis dalam bentuk:

$$e = \frac{\Delta N}{\Delta W} \cdot \frac{W}{N} \dots\dots\dots(2.2)$$

atau dalam bentuk diferensial:

$$e = \frac{\partial N}{\partial W} \cdot \frac{W}{N} \dots\dots\dots(2.3)$$

Bila tingkat upah naik, jumlah orang yang dipekerjakan menurun, dan sebaliknya. Jadi, $\frac{\Delta N}{\Delta W}$ dalam persamaan (2.2) dan $\frac{\partial N}{\partial W}$ dalam persamaan (2.3) adalah negatif. Oleh sebab itu elastisitas permintaan akan tenaga kerja juga negatif. Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung dari empat faktor, yaitu:

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal.
2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
3. Proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi.
4. Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya.

2.1.2 Penanaman Modal Asing

2.1.2.1 Pengertian Penanaman Modal Asing

Menurut Harjono (Panjaitan, 2003:28-32) penanaman modal asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*), unsur asing mana dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang

ditanam adalah modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing diperlukan bagi negara berkembang untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonominya. Hal ini dikarenakan modal asing membantu dalam industrialisasi dan pembaharuan teknologi yang digunakan dalam negara berkembang. Selain itu modal asing diperlukan untuk menciptakan kesempatan lapangan kerja baru dan menambah keterampilan keahlian dari tenaga kerja.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Penanaman Modal Asing

Berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*Foreign Direct Investment*) dan yang dilakukan secara tidak langsung (*Foreign Indirect Investment*), di antaranya sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Jangka Panjang/Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*)

Investasi langsung adalah investasi pada *asset-asset* riil, seperti pabrik, tanah termasuk modal dan manajemen. Investasi langsung biasanya terlihat dalam praktik akuisisi perusahaan atau pembelian sebagian besar bahkan semua kepemilikan perusahaan di perusahaan lain. *Foreign direct investment* biasanya dilakukan perusahaan multinasional yang melakukan usaha seperti sumber daya alam, manufaktur dan jasa (Salvatore dalam Prakoso, 2009:3).

2. Investasi Tidak Langsung (*Foreign Indirect Investment*)/Investasi Portofolio (*Portofolio Investment*)

Menurut Salvatore (Prakoso, 2009:3) investasi portofolio adalah investasi yang pada dasarnya berhubungan dengan aset-aset secara finansial, seperti surat hutang, saham, obligasi, dan lainnya. Investasi ini tidak memasukkan unsur kepemilikan. Aliran modal ini termasuk aliran modal finansial yang biasanya memberikan dampak seketika terhadap neraca pembayaran ataupun nilai tukar, dibandingkan dari sisi pendapatan ataupun produksi.

2.1.2.3 Manfaat Penanaman Modal Asing

Menurut Arsyad (2010:229) manfaat investasi asing atau penanaman modal asing bagi negara sedang berkembang, antara lain:

1. Untuk Menciptakan Lapangan Kerja

Penanaman modal asing akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dari berdirinya perusahaan-perusahaan baru. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan baru yang berdiri maka akan membutuhkan pekerja sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dan akan mengurangi jumlah pengangguran.

2. Proses Alih Teknologi dan Keterampilan yang Bermanfaat

Semakin banyak investor menanamkan modalnya di Indonesia, maka akan semakin banyak juga alat-alat teknologi baru yang mereka bawa dari negaranya masing-masing untuk menunjang proses produksi di Indonesia sehingga dengan seiring waktu teknologi-teknologi tersebut akan dikembangkan juga di Indonesia. Investor juga akan memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia untuk menunjang keberhasilan bisnisnya di Indonesia.

3. Sumber Tabungan atau Devisa

Penanaman modal asing memiliki peranan yang sangat penting terhadap perekonomian. Selain sebagai modal pembangunan, penanaman modal asing juga membawa pengaruh positif terhadap sektor moneter yaitu apabila investasi asing meningkat maka akan mendorong peningkatan cadangan devisa.

2.1.3 Penanaman Modal Dalam Negeri

2.1.3.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Untuk meningkatkan minat penanaman modal dalam negeri ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya yaitu ketersediaan data pendukung untuk analisis usaha (terutama data awal) seperti tingkat hasil (*return*) yang mungkin diperoleh, stabilitas politik keamanan di daerah itu sendiri, pasar yang dilayani, kebijakan pemerintah daerah daya serap terhadap angkatan kerja, tingkat responsibilitas masyarakat terhadap jenis usaha yang akan dikembangkan, birokrasi bisnis di daerah dan tingkat persaingan. Apabila pemerintah daerah mampu memberikan jaminan terhadap semua hal tersebut maka para investor akan mempertimbangkan dan dapat memutuskan menanamkan modalnya di daerah

tersebut. Selain itu, terdapat dua faktor utama yang cukup berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat investasi atau penanaman modal di antaranya yaitu tingkat suku bunga dan tingkat pengembalian (*return*).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2011:29). Subandi (2011:15) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* atau *Gross National Product* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktural atau tidak.

Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan *output*, pertumbuhan *output* per pekerja, dan pertumbuhan *output* per kapita. Pertumbuhan *output* digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan *output* per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sementara, pertumbuhan *output* per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi (Bhinadi dalam Afiat, 2017:55).

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata sangat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan tersebut muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk dapat menaksirkan perubahan *output* adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk dapat mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Sebab dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan pada harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total *output* barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang yang dihasilkan selama periode pengamatan (Raharja dan Manurung, 2016:141).

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan peningkatan *output* dan pendapatan riil per kapita memang bukanlah tujuan utama, namun menaikkan tingkat pertumbuhan *output* perlu dilakukan, karena pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai syarat yang sangat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan sebagai suatu prasyarat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya seperti peningkatan pendapatan dan juga kekayaan masyarakat, ataupun penyediaan fasilitas dan sarana sosial lainnya.

Menurut Sukirno (2006:432-437) teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang di antaranya, yaitu:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Para ahli ekonomi klasik menitikberatkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan penduduk.

Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebih, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi, maka pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini akan menimbulkan investasi baru dan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Tetapi keadaan seperti ini tidak akan terus berlangsung apabila jumlah penduduk terus bertambah, pertumbuhannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif, dan menyebabkan kembali menurunnya kemakmuran masyarakat.

Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah apabila keadaan ini tercapai dan dapat dikatakan ekonomi telah mencapai keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya akan mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik. Setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitan antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk.

Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Menurut teori tersebut, jumlah penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan jumlah penduduk tertentu kondisi produksi marjinal telah sama dengan pendapatan per kapita. Pada keadaan ini pula pendapatan per kapita mencapai nilai yang maksimum. Sementara itu, jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal, maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. Artinya, penambahan jumlah penduduk suatu wilayah akan berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

2. Teori Pertumbuhan Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan di dalam perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru. Menurut Schumpeter, investasi dibedakan menjadi dua golongan di antaranya yaitu penanaman modal otonomi dan penanaman modal

terpengaruh. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi.

Menurut Schumpeter semakin tinggi tingkat kemajuan ekonomi, semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat keadaan tidak berkembang atau *stationary state*. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan Klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan menurut pandangan Klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.

3. Teori Harrod-Domar

Dalam menganalisis masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka Panjang. Analisis Harrod-Domar merupakan pelengkap kepada analisis Keynesian. Dalam analisis Keynesian yang diperhatikan adalah persoalan ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam teori Harrod-Domar memperhatikan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui teori Harrod-Domar dapat dijelaskan dalam jangka panjang penambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu

dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila $I + G + (X-M)$ terus menerus bertambah dengan tingkat yang menggalakkan.

4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Berbeda dari teori Keynes dan teori Harrod-Domar yang melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut permintaan, teori Neo-Klasik melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut penawaran. Menurut teori Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Di mana:

ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.

ΔK adalah tingkat pertumbuhan modal.

ΔL adalah tingkat pertumbuhan penduduk.

ΔT adalah tingkat perkembangan teknologi.

Menurut teori Neo-Klasik, rasio modal-tenaga kerja yang rendah pada negara-negara berkembang menjanjikan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu reformasi pasar bebas akan memicu investasi yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan standar kehidupan.

Menurut analisis Solow, faktor penting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan tenaga kerja,

faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Sumbangan terpenting dari teori Neo-Klasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut dengan tujuan mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan Neo-Klasik juga dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T.W Swan (1956) dari Australia. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi modal/*capital*, kemajuan teknologi, dan besarnya *output* yang saling berinteraksi (Tarigan, 2005). Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi.

Model pertumbuhan tersebut dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap *output* barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan secara eksogen, atau dengan kata lain ditentukan di luar model. Model ini memprediksi bahwa pada akhirnya akan terjadi konvergensi dalam perekonomian menuju kondisi pertumbuhan *steady-state* yang bergantung hanya pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga

kerja. Dalam hal ini, kondisi *steady-state* menunjukkan *equilibrium* perekonomian jangka panjang (Mankiw, 2006).

Asumsi utama yang digunakan dalam model Solow adalah bahwa modal mengalami *diminishing returns*. Jika persediaan tenaga kerja dianggap tetap, dampak akumulasi modal terhadap penambahan *output* akan selalu lebih sedikit dari penambahan sebelumnya, mencerminkan produk marjinal modal (*marginal product of capital*) yang kian menurun. Jika diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja, maka *diminishing return* pada modal mengindikasikan bahwa pada satu titik, penambahan jumlah modal (melalui tabungan dan investasi) hanya cukup untuk menutupi jumlah modal yang susut karena depresiasi. Pada titik ini perekonomian akan berhenti tumbuh, karena diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja (Mankiw, 2006).

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2016:429-432) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya yaitu:

1. Tanah dan Kekayaan Alam

Kekayaan alam dapat mempermudah dalam usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di negara yang baru memulai pertumbuhan ekonomi terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor utama (pertanian dan

pertambangan) yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat. Kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis kegiatan ekonomi membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi.

Apabila suatu negara mempunyai kekayaan alam dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin sehingga bisa menghasilkan keuntungan, maka hambatan-hambatan yang dipaparkan di atas bisa diatasi dan akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara bisa memanfaatkan dan mengelola sumber daya alamnya dengan baik dan memperoleh keuntungan maka akan menarik pengusaha-pengusaha asing untuk berinvestasi dan ikut mengolah kekayaan alam negara tersebut. Modal yang cukup, teknologi, teknis produksi yang modern dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam diolah secara efisien dan menguntungkan.

2. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong ataupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan menambah jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu sebagai akibat dari pendidikan, latihan dan pengalaman kerja akan menyebabkan keterampilan penduduk bertambah tinggi dan akan menyebabkan produktivitas bertambah, dan selanjutnya akan menimbulkan

pertambahan produksi yang lebih cepat dari pertambahan tenaga kerja. Perlu diingat pula bahwa pengusaha adalah sebagian dari penduduk. Maka luasnya kegiatan ekonomi suatu negara tergantung seberapa banyak jumlah pengusaha di negara tersebut.

Selain itu dorongan lain yang timbul dari bertambahnya jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi adalah bertambahnya luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan sektor perusahaan akan bertambah pula. Oleh karena itu perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan pada pertambahan produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi.

Akibat buruk dari pertambahan penduduk akan dirasakan oleh negara yang pertumbuhan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Suatu negara dipandang menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia dan akan mengakibatkan produktivitas marjinal penduduk rendah. Ini berarti pertambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam produksi nasional, walaupun bertambah akan sangat lambat dan tidak dapat mengimbangi pertambahan penduduk. Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan di mana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional yang tingkatnya lebih cepat dari tingkat pertambahan penduduk, pendapatan per kapita akan menurun,

dengan demikian penduduk yang berlebihan akan menyebabkan kemakmuran masyarakat merosot.

3. Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi

Dalam pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal merupakan hal yang sangat penting dalam mempertinggi tingkat efisiensi pertumbuhan ekonomi. Di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar peranannya dalam kegiatan ekonomi. Pada masa sekarang pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi itu.

Apabila hanya barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa sekarang. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu pendapatan per kapita hanya mengalami perkembangan yang sangat kecil. Kemajuan teknologi akan menimbulkan kemajuan ekonomi suatu negara. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi yang

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Efek yang utamanya yaitu:

- a. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi.
- b. Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah di produksi sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat.
- c. Kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.

4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Salah satu peranan yang penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Dalam menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat dalam penggunaan cara produksi yang modern dan produktivitas yang tinggi, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat. Juga dalam sistem sosial di mana sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan-tuan tanah.

Selain itu, sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sebagian masyarakat memiliki sikap yang dapat memberikan dorongan besar kepada pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya yaitu sikap berhemat, sikap tersebut bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang dengan maksud dialokasikan kepada kegiatan investasi, sikap yang sangat menghargai kerja keras dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan.

Untuk mengetahui besar kecilnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara ataupun daerah dapat dilihat dari produktivitas atau *output* yang di hasilkan oleh negara atau daerah tersebut. Indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala daerah di mana PDB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Data pendapatan regional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional dalam suatu periode. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB adalah sebagai berikut:

1. PDRB atas dasar harga berlaku atau nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan atau riil dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.1.5 Upah Minimum

2.1.5.1 Pengertian Upah Minimum

Teori Neo-Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut (Simanjuntak, 2001:127). Dengan kata lain tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha adalah:

$$W = VMPP_L = MPP_L \times P$$

W : tingkat upah (dalam arti *labor cost*) yang di bayarkan pengusaha kepada pekerja.

P : harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang.

MPP_L : *marginal physical product of labor* atau pertambahan hasil marjinal pekerja, diukur dalam unit barang per unit waktu.

$VMPP_L$: *value of marginal physical product of labor* atau nilai pertambahan hasil marjinal pekerja atau karyawan.

Nilai pertambahan nilai marjinal karyawan $VMPP_L$, merupakan nilai jasa yang diberikan oleh karyawan kepada pengusaha. Sebaliknya upah, W , dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan terhadap jasa karyawan yang diberikan kepada pengusaha.

Jadi selama nilai pertambahan hasil marjinal karyawan lebih besar dari upah yang dibayarkan pengusaha ($VMPP_L > W$), pengusaha dapat menambah keuntungan dengan menambah pekerja, namun pengusaha tentu tidak bersedia membayar upah yang lebih besar dari nilai usaha kerja yang diberikan karyawan kepada pengusaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut teori Neo-Klasik, karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marjinalnya. Dengan kata lain, upah dalam hal ini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha (Simanjuntak, 2001:127-128).

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Pasal (1) Huruf (a) tentang perlindungan upah berbunyi, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan per undang-undangan dan dibayar atas suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja

dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (Trimaya, 2014:14). Sukirno (2005:351) menjelaskan bahwa upah mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Upah uang

Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.

2. Upah riil

Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Sementara itu, Sumarsono (2003:141) menjelaskan upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sub sektoral. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan terendah yang ditetapkan dan diatur secara minimal baik regional, sektoral, maupun sub sektoral.

Tujuan ditetapkannya upah minimum oleh pemerintah adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat meningkatkan derajat penduduk berpendapatan rendah tanpa mengurangi produktifitas

perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 pasal 3 tentang Dasar dan Wewenang Penetapan Upah Minimum yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.5.2 Fungsi Upah

Upah merupakan faktor utama bagi tenaga kerja, karena digunakan untuk membiayai kehidupan tenaga kerja beserta keluarganya. Soepomo dalam Halim (2001:178), mengatakan bahwa pada hakikatnya fungsi dari upah, yaitu:

1. Perwujudan keadilan sosial dalam rangka memanusiakan manusia.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar yang minimal bagi tenaga kerja pada tingkat di mana hidup layak dari hasil pekerjaan yang dilakukan.
3. Pendorong peningkatan disiplin dan produktivitas kerja.

Selain itu, menurut Mochtar Halim (2000:24), fungsi upah itu berbeda-beda, tergantung dari sudut mana upah itu dilihat, sebagaimana berikut ini:

1. Dari sudut pandang tenaga kerja, upah berfungsi sebagai kebutuhan hidup yang layak bersama keluarganya.
2. Dari sudut pandang pemberi kerja, upah berfungsi sebagai unsur penggerak dalam proses produksi dan merupakan biaya produksi dari perusahaan.
3. Dari sudut pandang pemerintah, upah merupakan tolok ukur hidup masyarakat. Oleh karena itu, perumusan upah harus dapat menciptakan iklim usaha yang harmonis, serasi, mantap, tenteram, dan dinamis.

2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Menurut Sukirno (2005:364-365) tingkat upah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu:

1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis penawaran pekerjaan dan tenaga kerja.
2. Perbedaan corak pekerjaan, seperti ringan dan mudah dikerjakan tingkat upah akan cenderung lebih rendah dari pekerjaan yang berat dan sulit dikerjakan.
3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan.
4. Pertimbangan bukan keuangan, seperti fasilitas perumahan yang tersedia, jauh-dekatnya dari rumah pekerja, lokasi pekerjaan ada di kota atau di daerah terpencil dan lain sebagainya.
5. Ketidaksempurnaan mobilitas pekerja.

Selain itu, T. Gilarso (2003:215-216) berpendapat bahwa setidaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi penentuan tingkat upah yang berlaku dalam masyarakat, yaitu:

1. Produktivitas kerja.
2. Tingkat harga.
3. Struktur ekonomi nasional.
4. Peraturan pemerintah.
5. Keadilan dan perikemanusiaan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjadi acuan, pembandingan, serta memperkuat hasil analisis yang dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Penulis, dan Sumber	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Samarinda. (Khairil Akbar dan Gunadi/JURNAL EKSIS Vol.14, No.2 Tahun 2018 Hal: 3436-3530. ISSN: 0216-6437)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - PMA - PMDN	Dependen: - Independen: -	- Secara simultan investasi melalui PMDN dan PMA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja khususnya di Kota Samarinda. - Secara parsial investasi PMA pada sektor ekonomi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja di bandingkan PMDN di Samarinda.
2.	Analisis Pengaruh Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Periode 1985-2014.	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - PMA - PMDN	Dependen: - Independen: -	- Secara parsial hubungan antara PMDN dan penyerapan tenaga kerja adalah signifikan positif. - Secara parsial hubungan antara PMA dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Aprilia Dwi Ratna Sari, dkk./Vol.16, No.2 Tahun 2015 Hal: 105-112. ISSN 1411-4321)			Tengah adalah signifikan negatif. - Secara bersama-sama PMDN dan PMA berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
3.	Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya terhadap Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara. (Junaidi E. Momongan/Jurnal EMBA Vol.1, No.3 September 2013, Hal. 530-539. ISSN 2303-1174)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - PMA - PMDN	Dependen: - PDRB Independen: -	- Secara simultan investasi PMA dan PMDN memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PDRB ADHK 2000 yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2000-2011. - Secara simultan perkembangan investasi PMA, PMDN serta perkembangan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja di Sulawesi Utara. - Secara simultan perkembangan investasi PMA, PMDN serta perkembangan PDRB berpengaruh signifikan terhadap upaya penurunan kemiskinan di Sulawesi Utara.
4.	Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Upah Minimum, dan belanja modal terhadap Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. (Rizki Kenraraswati, dkk. /Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 14, No. 1, Januari-	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - PMDN - Upah Minimum	Dependen: - Independen: - Belanja Modal	- Secara parsial variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan sedangkan variabel PMDN dan UMP berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. - Secara simultan PMDN, UMP, dan belanja modal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Juni 2019. Hal: 37 -44 ISSN: 2085- 1960)			berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.
5.	Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lombok Barat. (Lalu Mimbar dan Muhammad Yusuf/ Jurnal Valid Vol. 13, No. 3 Juli 2016. Hal: 333-343)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri - Upah	Dependen: - Independen: - Investasi Sektor Industri	- Secara parsial variabel laju pertumbuhan sektor industri berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Lombok Barat. - Secara parsial variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Lombok Barat. - Secara parsial variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Barat. - Secara bersama-sama variabel independen laju pertumbuhan sektor industri, investasi, dan upah secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Lombok Barat.
6.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Muhammad Nur Afiat/ JURNAL MEGA AKTIVA Vol. 6, No. 2 Tahun 2017. Hal: 54-59. ISSN 2086-1974)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - Pertumbuhan Ekonomi	Dependen: - Independen: -	- Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara.
7.	Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja	Dependen: -	- Secara parsial dan simultan upah minimum berpengaruh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado. (Dewi M. Sabihi, dkk. /Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 21, No. 01 Juli 2021. Hal: 25-36)	Independen: - Upah Minimum - Pertumbuhan Ekonomi	Independen: - Investasi	negatif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja. - Secara parsial investasi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja. - Secara parsial Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja.
8.	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. (Muhammad Syafri dan Zulfanetti/Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.18 No.1 Tahun 2018. Hal: 77-86)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - Upah Minimum	Dependen: - Independen: - Pengeluaran Pemerintah	- Secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Sedangkan variabel UMP dan Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.
9.	Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur. (Esthi Bhakti Warapsari, dkk./Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 4, No. 2, 2020. Hal: 194-208)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - Upah Minimum	Dependen: - Independen: - Inflasi - PDRB	- Secara parsial variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. - Secara parsial variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. - Secara parsial variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. - Secara simultan variabel inflasi, PDRB, dan upah minimum memiliki

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
10.	Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. (Anton Trianto/ AKUISISI-VOL 13 No. 1 April 2017)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - Pertumbuhan Ekonomi	Dependen: - Independen: -	- Hasil penelitian yaitu didapati bahwa selama periode 2011-2015 elastisitas tenaga kerja Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak masuk dalam kategori inelastis, hanya pada tahun 2013 kategorinya elastis dan perbandingan nilai elastisitas antar kabupaten/kota setiap tahunnya selalu berbeda-beda. Pada tahun 2011-2015 pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan relatif belum stabil.
11.	Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. (I Gusti Agung Inradewa dan Ketut Suardhika Natha/E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.4, No.8 Agustus 2015. Hal: 923-950. ISSN: 2303-0178)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - Upah Minimum	Dependen: - Independen: - PDRB - Upah Minimum	- Secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. - Secara simultan variabel bebas PDRB, upah minimum, dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan.
12.	Analisis Pengaruh Investasi PMA, PMDN, Nilai Produksi, dan Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - PMA	Dependen: - Independen: - Nilai	- Secara parsial jumlah investasi asing PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan, jumlah investasi PMDN berpengaruh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kerja Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Timur. (Linda Kurnia Dewi dan Kunto Inggit Gunawan/ JEB 17 Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 3, No. 2, September 2018. Hal: 711-724)	- PMDN	- Produksi Unit Usaha	positif dan signifikan, jumlah nilai produksi berpengaruh negatif dan signifikan serta jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur. - Secara simultan variabel independen yaitu investasi PMA, PMDN, nilai produksi dan unit usaha secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur.
13.	<i>The Effect Of Investment, Unemployment, Minimum Wages on Labor Absorption in West Java Province 2008-2020.</i> (Uswatun Hasanah/ <i>International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research – IJEBAR Vol. 5 Issue-2, June 2021 page 506. E-ISSN: 2614-1280</i>)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - Upah Minimum	Dependen: - Independen: - Investasi - Pengangguran	- Secara parsial variabel upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel investasi dan pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. - Secara simultan variabel investasi, pengangguran, dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
14.	<i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Takalar.</i> (Nur Insana/ Fakultas Ekonomi dan	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - Upah Minimum Regional	Dependen: - Independen: - Rata-rata Lama Sekolah	- Secara parsial variabel Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)	- Pertumbuhan Ekonomi		- Secara parsial rata-rata lama sekolah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar. - Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar.
15.	Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jambi Tahun 2000-2018. (Rita Anggraini, dkk./E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 9, No. 2, Mei-Agustus 2020. Hal: 77-90. ISSN: 2303-1255)	Dependen: - Penyerapan Tenaga Kerja Independen: - Pertumbuhan Ekonomi - Upah Minimum	Dependen: - Independen: - Investasi	- Secara parsial variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jambi. - Secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jambi. - Secara bersama-sama variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka dimunculkan kerangka berpikir agar dapat menjelaskan beberapa variabel yang memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Variabel-variabel tersebut adalah penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum. Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian ini bekerja dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

2.2.1 Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penanaman modal asing dapat memberikan sumbangan positif terhadap perekonomian. Semakin tingginya jumlah penanaman modal asing tentu akan semakin banyak pula perusahaan baru yang berdiri serta akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. Semakin banyaknya perusahaan dengan modal asing yang berdiri maka perusahaan tersebut juga akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menunjang operasional perusahaannya, maka akan berdampak pada perluasan atau penyerapan tenaga kerja serta berkurangnya pengangguran.

Menurut Arsyad (2010:229) selain untuk menciptakan lapangan kerja, penanaman modal asing juga sebagai proses ahli teknologi dan keterampilan yang bermanfaat serta sumber tabungan atau devisa bagi negara. Sehingga hubungan penanaman modal asing dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khairil Akbar dan Gunadi (2018) dengan judul *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Samarinda*. Dalam penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa penanam modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya perubahan investasi secara teori dan kenyataan dapat menyerap jumlah tenaga kerja selain itu penanaman modal asing yang dilakukan tidak hanya meningkatkan jumlah tenaga kerja saja melainkan juga untuk penyediaan peralatan produksi, tanah/bangunan dan lainnya.

2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Jumlah penanaman modal dalam negeri di suatu daerah akan berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang akan terserap di daerah tersebut. Semakin banyak penanaman modal dalam negeri maka berdampak pada perluasan usaha dan pembukaan perusahaan-perusahaan baru. Hal ini dikarenakan untuk merealisasikan kapasitas produksi yang lebih tinggi, maka diperlukan modal manusia yang mencukupi yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian hubungan penanaman modal dalam negeri dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif.

Hubungan positif antara penanaman modal dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilia Dwi Ratna Sari, Dody Setyadi dan Umar Farouk (2015) yang berjudul *Analisis Pengaruh Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Periode 1985-2014* yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja artinya bila jumlah penanaman modal dalam negeri bertambah maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah. Hal ini sangat wajar karena nilai investasi memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang dan mempercepat pertumbuhan lapangan kerja yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan seperti tingginya jumlah pengangguran dikarenakan

jumlah tenaga kerja yang tinggi tetapi lapangan pekerjaan terbatas. Semakin besar nilai investasi penanaman modal dalam negeri yang ditanamkan, semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap dan begitu juga sebaliknya.

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan per kapita terus meningkat sehingga memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDRB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer khususnya industri manufaktur.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja produksi baik dari sektor primer atau pertanian hingga beralih pada sektor sekunder dan tersier (industri/modern). Sehingga pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor ekonomi yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Nur Afiat (2017) yang berjudul *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di*

Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja karena apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga akan memerlukan lebih banyak tenaga kerja untuk menunjang proses produksi. Sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja.

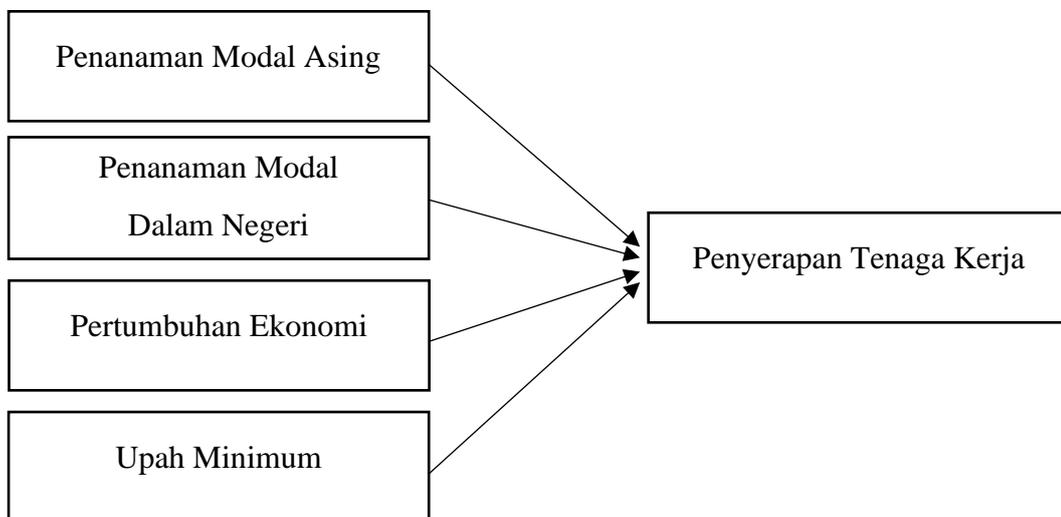
2.2.4 Hubungan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah merupakan faktor utama bagi tenaga kerja, karena digunakan untuk membiayai keberlangsungan hidup tenaga kerja beserta keluarganya. Maka dari itu, menurut Soedarjadi (2009:115) pemberian upah harus dilakukan dengan melihat kebutuhan riil minimum tenaga kerja, sehingga tenaga kerja dan keluarganya dapat hidup dengan layak. Bertambahnya nilai upah akan meningkatkan kehidupan layak tenaga kerja namun peningkatan upah yang ditetapkan terlalu tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan produksi kerja akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengurangan terhadap penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi dan menggunakan teknologi padat modal. Sehingga perubahan tingkat upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Dalam kacamata perusahaan, upah merupakan biaya produksi. Maka, naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya harga per unit barang yang diproduksi. Apabila banyak barang yang tidak terjual karena harganya yang meningkat dan perusahaan sebagai produsen harus menurunkan jumlah produksinya sehingga akan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan, hal tersebut berarti

penyerapan tenaga kerja juga berkurang. Kesimpulannya, upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi M. Sabihi, Anderson G. Kumenaung, dan Audie O. Niode (2021) yang berjudul *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado*, hal ini terjadi karena adanya peningkatan tingkat upah akan menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara jelasnya, kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dalam gambar 2.6 di bawah ini.



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020.
2. Diduga penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 1999-2020.